

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK JAWA TIMUR SERAHKAN 20 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2021

Sidoarjo, Kamis (30 Desember 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pemeriksaannya dilaksanakan pada Semester II Tahun 2021. LHP yang diserahkan kepada entitas pemeriksaan terdiri dari 10 LHP Kinerja dan 10 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur **Joko Agus Setyono** menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan pimpinan entitas pemeriksaan dalam acara yang diselenggarakan melalui *virtual conference*.

LHP Kinerja yang diserahkan BPK terdiri dari:

1. LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Pemerintah Kabupaten Situbondo
2. LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Madiun, dan Pemerintah Kabupaten Malang;
4. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Tuban, dan Pemerintah Kota Probolinggo.

Adapun LHP Dengan Tujuan Tertentu yang diserahkan kepada entitas pemeriksaan yaitu:

1. LHP Kepatuhan atas Belanja Modal dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Batu;
4. LHP Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi;
5. LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
6. LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dan Kota Pasuruan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan, di antaranya:

Pemeriksaan	Permasalahan Signifikan
Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah daerah belum efektif dalam menyosialisasikan pesan kunci yang mendorong/memotivasi masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi COVID-19- Upaya pemerintah daerah dalam melakukan pendataan target/sasaran vaksinasi COVID-19 belum sepenuhnya memadai
Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan penjaminan mutu pendidikan vokasi yang selaras dengan industri dan dunia kerja- Pemerintah daerah belum sepenuhnya memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk menerapkan fleksibilitas keuangan
Kinerja atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan perizinan belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai- Pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan berusaha belum diterapkan- Kegiatan promosi penanaman modal belum ditindaklanjuti secara memadai
Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kemandirian fiskal dan kebijakan pengelolaan PAD belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)- Pemerintah daerah belum melakukan pendataan secara periodik untuk objek dan wajib pajak maupun retribusi

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 8669244

Fax : (031) 8669206

Email: humas.jatim@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Pemeriksaan	Permasalahan Signifikan
Kepatuhan atas Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat lembaga/kelompok masyarakat penerima hibah yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada pemerintah daerah- Terdapat pengadaan paket sembako pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa- Terdapat hasil pelaksanaan paket pekerjaan Jalan yang tidak sesuai kontrak- Terdapat kekurangan volume dan mutu atas pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Terdapat proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume hasil pekerjaan, dan sanksi denda keterlambatan belum dikenakan (Belanja Modal Jalan dan Irigasi)
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Kelompok Kerja pada KPU Kabupaten/Kota,- Terdapat pembayaran honorarium Pengawas/Kelompok Kerja Pengawasan yang tidak sesuai ketentuan

Pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sebelum LHP diserahkan kepada setiap entitas yang diperiksa, BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di entitas pemeriksaan atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP mudah ditindaklanjuti.

BPK berharap hasil pemeriksaan bermanfaat bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan/program yang dilakukan oleh pemerintah daerah/entitas pemeriksaan serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan tata kelola keuangan negara/daerah. Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK mengingatkan bahwa rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 8669244

Fax : (031) 8669206

Email: humas.jatim@bpk.go.id